

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.03

Dirjen Badan Peradilan Umum

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu · Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bengkulu, 7 Januari 2021

Sekretaris,



Endri Novian, SE

NIP. 197511092003121001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	
I Laporan Realisasi Anggaran	iv
II Neraca	iv
III Laporan Operasional	iv
IV Laporan Perubahan Ekuitas	iv
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	1
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	1
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	2
A.3 Basis Akuntansi	2
A.4 Dasar Pengukuran	2
A.5 Kebijakan Akuntansi	2
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1 Pendapatan	7
B.2 Belanja	8
B.3 Belanja Pegawai	9
B.4 Belanja Barang	9
B.5 Belanja Modal	9
B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	9
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	10
C.2 Persediaan	10
C.3 Persediaan yang Belum Diregister	10
C.4 Uang Muka dari KPPN	10
C.5 Ekuitas	10
C.6 Catatan Penting Lainnya neraca	10
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	11
D.2 Beban Pegawai	11
D.3 Beban Persediaan	11
D.4 Beban Barang dan Jasa	12
D.5 Beban Pemeliharaan	12
D.6 Beban Perjalanan Dinas	12
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	13
D.8 Beban Bantuan Sosial	13
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	13
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	14
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	14
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14
D.14 Pos Luar Biasa	14
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	15
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1 Ekuitas Awal	16
E.2 Surplus (Defisit) LO	16
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	16
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	16
E.5 Transaksi Antar Entitas	17
E.6 Ekuitas Akhir	18
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	19
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bengkulu, 7 Januari 2021

Sekretaris,



Endri Novian, SE

NRP. 197511092003121001

I. LRA PERBANDINGAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

U R A I A N	Catatan	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	120.000	810.000	675,00	730.000
JUMLAH PENDAPATAN		120.000	810.000	675,00	730.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	308.050.000	217.287.800	70,54	126.154.500
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		308.050.000	217.287.800	70,54	126.154.500

II. NERACA PERBANDINGAN

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	Catatan	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan F	C.12	-	-
Persediaan	C.2	70.882.429	80.802.220
Persediaan yang Belum Diregister	C.3	-	-
Jumlah Aset Lancar		70.882.429	80.802.220
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.16	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.19	-	-
Tanah Belum Diregister	C.20	-	-
Peralatan dan Mesin	C.21	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.22	-	-
Gedung dan Bangunan	C.23	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.24	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.25	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.26	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.27	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.28	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.29	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.30	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.30	-	-
Aset Tak Berwujud	C.31	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.32	-	-
Aset Lain-lain	C.33	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.34	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.35	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		70.882.429	80.802.220
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.37	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.38	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.39	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.40	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.41	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.42	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.43	70.882.429	80.802.220
JUMLAH EKUITAS		70.882.429	80.802.220
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		70.882.429	80.802.220

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	810.000	730.000
Jumlah Pendapatan		810.000	730.000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	45.008.715	47.626.176
Beban Barang dan Jasa	D.4	48.413.000	19.450.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	147.735.800	56.650.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Jumlah Beban		241.157.515	123.726.176
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(240.347.515)	(122.996.176)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	27.000	(773.100)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		27.000	(773.100)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(240.320.515)	(123.769.276)
Pos Luar Biasa	D.14		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(240.320.515)	(123.769.276)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	80.802.220	90.051.208
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(240.320.515)	(123.769.276)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	230.400.724	114.520.288
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(9.919.791)	(9.248.988)
EKUITAS AKHIR	E.6	70.882.429	80.802.220

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp810.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp810.000 atau mencapai 675,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp120.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp217.287.800 atau mencapai 70,54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp308.050.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020 . Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp70.882.429 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp70.882.429; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp70.882.429

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp810.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp241.157.515 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-240.347.515, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp27.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-240.320.515.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp80.802.220, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-240.320.515 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 230.400.724 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp70.882.429

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah ikut berperan aktif untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2020	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.000	120.000
Jumlah Pendapatan	120.000	120.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	259.550.000	308.050.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	259.550.000	308.050.000

Realisasi Pendapatan
Rp810.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp810.000 atau mencapai 675,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp120.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Bengkulu terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp810.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.000	810.000	675,00
Jumlah	120.000	810.000	675,00

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 10,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	810.000	730.000	10,96
Jumlah	810.000	730.000	10,96

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp810.000

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing- masing sebesar Rp810.000 dan Rp730.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,96 dari TA 2019 karena berkurangnya penerimaan dari penyempuhan advokat. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	810.000	730.000	10,96
Jumlah	810.000	730.000	10,96

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	810.000	730.000	10,96
Jumlah	810.000	730.000	10,96

B.2 Belanja Pegawai

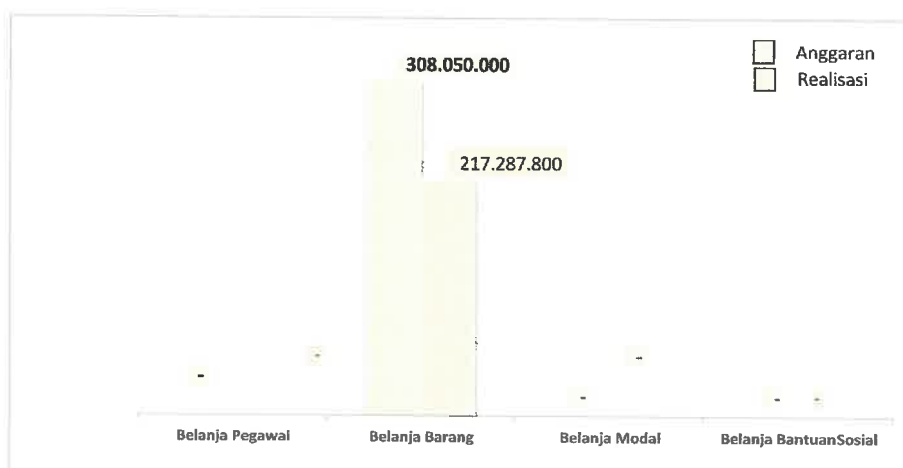
Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp217.287.800 atau 70,54 % dari anggaran belanja sebesar Rp.308.050.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	308.050.000	217.287.800	70,54
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	308.050.000	217.287.800	70,54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 72,24% karena adanya Realisasi Anggaran Belanja Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita. Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	217.287.800	126.154.500	72,24
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	217.287.800	126.154.500	72,24

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp217.287.800 dan Rp126.154.500. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 72,24% dari Realisasi TA 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena adanya Realisasi Belanja Barang keperluan Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita di Tahun Anggaran 2020

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Barang Operasional	9.754.000	8.444.000	15,51
Belanja Barang Non Operasional	30.259.000	11.006.000	174,93
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21.139.000	50.054.500	(57,77)
Belanja Jasa	8.400.000	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	147.735.800	56.650.000	160,79
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	217.287.800	126.154.500	72,24
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	217.287.800	126.154.500	72,24

Realisasi Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.5.1 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Persediaan
Rp70.882.429

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp70.882.429 dan Rp80.802.220. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Jenis	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Barang Konsumsi	70.882.429	80.802.220
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	70.882.429	80.802.220

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.3 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.4 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Ekuitas Rp70.882.429

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp70.882.429 dan Rp80.802.220. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Neraca yang perlu diungkapkan pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Rp810.000

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp810.000 dan Rp730.000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 10,96. Hal tersebut disebabkan oleh dari Pendapatan Hak Redaksi Putusan Perkara dan Pendapatan Penyempuhan Advokat. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	810.000	730.000,00	10,96
Jumlah	810.000,00	730.000,00	10,96

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp45.008.715

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp45.008.715 dan Rp47.626.176

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,50 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh karena adanya Belanja Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 yang dipengaruhi kondisi saat itu tidak dimungkinkan melakukan bimtek (banyak yang terpapar Covid-19), sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Persediaan konsumsi	45.008.715	47.626.176	(5,50)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	45.008.715,00	47.626.176	(5,50)

Beban Barang dan Jasa
Rp48.413.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp48.413.000 dan Rp19.450.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 148,91 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh karena adanya realisasi Belanja Barang untuk keperluan Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.754.000	8.444.000	15,51
Beban Bahan	30.259.000	11.006.000	174,93
Beban Jasa Profesi	8.400.000	-	-
	-	-	-
Jumlah	48.413.000	19.450.000,00	148,91

Beban Pemeliharaan
Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp147.735.800

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp147.735.800 dan Rp56.650.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 160,79 persen disebabkan oleh karena terdapat anggaran perjalanan dinas paket meeting dalam kota pada bimtek panitera dan jurusita. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Perjalanan Biasa	43.480.000	56.650.000	(23,25)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.050.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Ko	93.205.800	-	-
Jumlah	147.735.800,00	56.650.000	160,79

*Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp27.000

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp27.000 dan Rp773.100.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	423.000	698.500,00	(39,44)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(396.000)	(1.471.600,00)	(73,09)
Jumlah	27.000,00	(773.100)	(103,49)

Pos Luar Biasa Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional yang perlu diungkapkan pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp80.802.220,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.80.802.220,00 dan Rp.90.051.208,00

Defisit LO Rp.-
240.320.515,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.-240.320.515,00 dan Rp.-123.769.276,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2020

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2020

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp230.400.724

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.230.400.724 dan Rp.114.520.288. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	217.287.800
Diterima dari Entitas Lain	(810.000)
Transfer Keluar	(49.486.525)
Transfer Masuk	63.409.449
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	230.400.724

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp 217.287.800, sedangkan DDEL sebesar Rp 810.000

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp-49.486.525 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2020

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Buku-Buku Register, Palu Hakim dan kalung jabatan Hakim	Pengadilan Negeri	49.486.525
-	-	-
Jumlah		49.486.525

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp63.409.449 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Palu Hakim, Kalung Jabatan Hakim dan Buku Register Perkara Pidana, Perdata, PHI	Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI	63.409.449
-	-	-
Jumlah		63.409.449

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2020

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp70.882.429

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.70.882.429,00 dan Rp.80.802.220,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas yang perlu diungkapkan pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ini.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu dijelaskan pada Tahun Anggaran 2020 ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat pendapatan dan belanja akrua yang perlu dijelaskan pada Tahun Anggaran 2020 ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

1. BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-001696-30-6 A.n RPL 016 PT BENGKULU yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.750.000.
Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening)S-3825/MK.5/2015 tanggal 11 Mei 2015.
2. BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-002518-30-7 A.n BPG 016 Pengadilan Tinggi Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesarRp.0.
Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-127/WPB.09/KP.016/2015 Tanggal 28 Januari 2015.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara. Biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah. Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah biaya perkara di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.750.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu atau yang dikenal dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan dan penitipan. Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah biaya konsinyasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.0.
3. Biaya Eksekusi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menang dalam suatu perkara perdata terkait perkara bangunan atau tanah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah biaya konsinyasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.0.
4. Biaya Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesarRp.0

F.2.5. Revisi DIPA

Revisi DIPA ke-1 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 29 Mei 2020.

Revisi DIPA ke-2 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 19 Agustus 2020

Revisi DIPA ke-3 Penambahan Pagu Belanja Barang Tanggal 20 November 2020

Revisi DIPA ke-4 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 14 Desember 2020

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

1. Terdapat Perbaikan Transaksi (Kode Akun) atas Penerimaan Negara berupa Setoran Sisa TUP pada tanggal 12 Mei 2020.
Semula
Akun 815322 (Penerimaan Uang Muka Dana Otonomi Khusus) Menjadi
Akun 815511 (Setoran Sisa TUP)
2. Terdapat Perbaikan Transaksi (Kode Satker) atas Penerimaan Negara berupa Setoran Bukan Pajak pada tanggal 27 November 2020.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Tinggi Bengkulu.

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT WILAYAH
PERIODE TA. 2020 *UNAUDITED*

Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung RI
 Kode Es1 dan Nama Es1: (03) Dirjen Badilum
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (2600) Bengkulu

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak
1. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrual		Ada
2. Neraca Percobaan Kas		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/(Defisit) - LO</i> " di LPE		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar >> Akun Non Ref</i>)		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar >> Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		Tidak
Akun Dibayar dimuka (<i>prepaid</i>) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)		Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomtabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun <u>berjalan</u> .			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akruai	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			

9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Tidak
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca	Ada	Tidak
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



Mareta Isabella, SE

NIP.198903222009122001

Bengkulu, 07 Januari 2021

Penelaah,



Rina Astuti, SE

NIP .197308302006042015